



INSANIA

Jurnal kependidikan

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARATE
UNTUK MEMBENTUK KEDISIPLINAN SISWA DI SD
Bondhan Pamungkas

BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH IBTIDAIYYAH
(Paradigma Bimbingan Komprehensif dalam Bingkai Tematik-Integratif)
Muhamad Irham

PARADIGMA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERWAWASAN INTEGRATIF
Musmuallim

MEMBANGUN IKLIM INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM
YANG BERORIENTASI ETOS KERJA
Mustajab

PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD
Nuning Khamidah

TERAPI BERMAIN BAGI ANAK TUNARUNGU
Rina Rizki Amalia

GAGASAN DAN MANIFESTASI MODERNISASI PESANTREN
A.S PANJI GUMILANG DI MA'HAD AL-ZAYTUN
Sarno Hanipudin

SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN OTONOMI DAERAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Sri Winarsih

MODEL KEGIATAN SENI TARI UNTUK
MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK DI SD
Yuliana Indriyaningsih

KONSEP BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MENURUT QS. AN-NAHL : 78
Hartono

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus di Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris UNSOED)
Syaifur Rochman

**JURUSAN TARBIYAH (PENDIDIKAN)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**

INSANIA

Jurnal kependidikan

Vol. 18, No. 2, Mei - Agustus 2013

ISSN 1410- 0053

Ketua penyunting : Dr. Hartono, M.Si.
wakil Ketua Penyunting : Drs. Munjin, M.Pd.I.
Sekretaris Penyunting : Muhammad Nurhalim, M.Pd.
Anggota Penyunting : Mutijah S.Pd., M.Si.
- Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.
- Muh. Hanif, S.Ag., M.Ag., M.A.
- Ali Muhdi, S.Pd.I., M.S.I.
Editor Babasa : H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
- Yulian Purnama, S.Pd., M.Hum.
Layout : Tri Rachmijati, S.Ag., M.Pd.
Tata Usaba/Sirkulasi : Munajat

Susunan Redaksi Berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Nomor 242 Tahun 2011, Tanggal 10 Juni 2011

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARATE UNTUK MEMBENTUK KEDISIPLINAN SISWA DI SD Bondhan Pamungkas.....	155
BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH IBTIDAIYAH (Paradigma Bimbingan Komprehensif dalam Bingkai Tematik-Integratif) Muhamad Irham.....	167
PARADIGMA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERWAWASAN INTEGRATIF Musmuallim	187
MEMBANGUN IKLIM INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM YANG BERORIENTASI ETOS KERJA Mustajab.....	201
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD Nuning Khamidah.....	215
TERAPI BERMAIN BAGI ANAK TUNARUNGU Rina Rizki Amalia.....	231
GAGASAN DAN MANIFESTASI MODERNISASI PESANTREN A.S PANJI GUMILANG DI MA'HAD AL-ZAYTUN Sarno Hanipudin	245
SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Sri Winarsih	265
MODEL KEGIATAN SENI TARI UNTUK MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK DI SD Yuliana Indriyaningsih.....	287
KONSEP BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MENURUT QS. AN-NAHL : 78 Hartono	311
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus di Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris UNSOED) Syaifur Rochman	327

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
(STUDI KASUS DI PRODI S1 BAHASA
DAN SASTRA INGGRIS UNSOED)**

Syaifur Rochman

Jurusan Ilmu Budaya FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Jenderal Soedirman Timur No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah
e-mail : kidid2@yahoo.com

Abstract

This article discusses a survey in S1 Studies English Language and Literature Unsoed about students' perceptions of the factors that influence the national education system in Indonesia. There are 7 respondents in the survey consisted of 5 women and 2 men. They were respondents as doing research for a thesis under the guidance of the author deals with international standard junior high school in Purwokerto. Data were collected between 2009 and 2011 through in-depth discussion to find out their views on the national education system. The results showed that most respondents have similar views about the national education system in Indonesia.

Keywords : National Education System, Perception, Program English

Language and Literature Studies Unsoed.

Abstrak

Artikel ini membahas survey di Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris Unsoed tentang persepsi mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terdapat 7 responden dalam survey ini terdiri dari 5 wanita dan 2 laki-laki. Mereka menjadi responden karena melakukan penelitian untuk skripsi di bawah bimbingan penulis

berkaitan dengan sekolah berstandar internasional tingkat SMP di Purwokerto. Data dikumpulkan antara tahun 2009 sampai 2011 melalui diskusi mendalam untuk mengetahui pandangan mereka tentang sistem pendidikan nasional. Pertanyaan terdiri dari kesadaran budaya, pentingnya pengembangan rasa cinta terhadap budaya sendiri, ekonomi, kesadaran memiliki identitas nasional, bahasa resmi, politik, karakter nasional, dan internasionalisasi sistem pendidikan nasional. Hasilnya memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pandangan yang hampir sama tentang sistem pendidikan nasional Indonesia.

Kata kunci : Sistem Pendidikan Nasional, Persepsi, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Unsoed.

Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional suatu negara berhubungan dengan berbagai faktor yang mendasari pembuatan suatu kebijakan. Beberapa aspek telah dimiliki oleh suatu negara yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kondisi sosial maupun lokasi. Faktor-faktor tersebut adalah geografi, ekonomi, suku, filosofi, linguistik, moral, dan agama (Keller, 2011). Tetapi, faktor lain akan terkait dengan kecenderungan perubahan dalam ilmu pengetahuan yang berpengaruh pada pendidikan, seperti humanisme, sosialisme, dan demokrasi (Cambridge dan Thompson, 2004).

Pada era globalisasi, banyak negara di dunia yang saling tergantung pada negara lain dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan (Harman, 2005). Satu kejadian di sebuah negara seringkali memiliki dampak yang meluas ke negara-negara lain. Dengan kata lain, sistem pendidikan di sebuah negara secara positif atau negatif mempunyai efek pada sistem pendidikan negara yang lain (Hayden dan Thompson, 1997).

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sistem pendidikan nasional, beberapa analisis dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan. Kustalasari (2009) mengindikasikan bahwa latar belakang filosofi suatu negara akan berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa pondasi pendidikan yang bersifat universal.

Aspek-aspek yang bersifat umum dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun prinsip pada sistem pendidikan nasional dari beberapa negara. Knight (2004) berpendapat bahwa analisis yang mendalam terhadap aspek sistem pendidikan nasional bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa laju perkembangan suatu pendidikan nasional menunjukkan kemajuan atau kelambatan.

Artikel ini memberikan gambaran mahasiswa Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris Unsoed tentang pandangan mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional Indonesia. Banyak mahasiswa di Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris Unsoed tertarik melakukan penelitian untuk skripsi mereka dalam bidang Linguistik Terapan (Pengajaran Bahasa Inggris). Beberapa di antara mereka meneliti Sekolah Berstandar Internasional di tingkat SMP. Untuk itu, mereka perlu memahami konsep sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional digali berdasarkan pandangan mereka sebelum mulai penelitian. Sesudah itu, mahasiswa membaca berbagai kajian pustaka untuk mendukung pendapat-pendapat yang sesuai dengan bidang penelitiannya.

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

Sistem pendidikan nasional suatu negara memiliki tujuan untuk membantu masyarakatnya mengembangkan budaya mereka. Lebih lanjut, Ahmadi dan Amri (2010) menjelaskan bahwa pendidikan nasional dalam konteks budaya mencakup upaya pelestarian budaya, mengenalkan generasi muda terhadap budaya asli masyarakatnya, serta memberi kontribusi terhadap perkembangan budaya. Dengan demikian, tujuan dari pendidikan nasional di suatu negara adalah mengembangkan kesadaran kepemilikan budaya mereka.

Di setiap budaya, terdapat nilai-nilai yang tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu (Cambridge dan Thompson, 2004). Kepercayaan terhadap agama dan budaya adalah contohnya. Percaya pada Tuhan untuk kebenaran, tanpa kekerasan, serta idealisme universal tentang persaudaraan sesama manusia merupakan nilai luhur dari sebagian besar budaya di dunia. Aspek-aspek yang telah disebutkan itu telah ada di dalam

masyarakat selama bertahun-tahun dan bersifat abadi. Sistem pendidikan harus diselaraskan dengan aspek-aspek budaya di masyarakat (Fatah, Hartati dan Mulyasari, 2009).

Pendidikan nasional bertujuan untuk membangkitkan kecintaan terhadap budaya sendiri karena hal ini dapat memperkuat rasa nasionalisme (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Agar suatu bangsa menjadi kuat dan makmur, rasa cinta terhadap tanah air harus ditanamkan kepada warga negaranya. Lebih lanjut Harman, (2005) menjelaskan bahwa pendidikan di negara-negara maju selalu menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Dengan memasukan kepercayaan terhadap agama, aspek sosial, serta aspek kemanusiaan ke dalam kurikulum sistem pendidikan nasional, hal ini dapat menciptakan suatu nilai-nilai yang universal (Hayden dan Thompson, 1997).

Aspek ekonomi suatu negara dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam sistem pendidikan nasional (Fatah, Hartati dan Mulyasari, 2009). Jika ekonomi suatu negara rendah, maka pendidikannya biasanya juga akan tertinggal. Sejarah dari negara-negara berkembang telah membuktikan hal ini, termasuk Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional (2009) mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan dan kurikulum yang disusun memiliki arah yang membawa masyarakatnya untuk dapat hidup sejahtera.

Fatah, Hartati dan Mulyasari (2009) mengingatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pembangunan nasional. Melalui pengembangan kemampuan tiap individu dalam pendidikan, maka pembangunan nasional dapat lebih mudah terwujud. Tentunya sistem pendidikan nasional harus mampu meyakinkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk belajar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Cambridge dan Thompson (2004) menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional tidak membuat diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Perlakuan yang berbeda dalam sistem pendidikan nasional berarti mengabaikan hak warga negara untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pembangunan nasional. Sudah barang tentu, adanya kesenjangan dalam pendidikan akan bisa memperlemah negara itu sendiri.

Karakter nasional yang diperlukan untuk membangun bangsa diperlukan dalam pendidikan (Keller, 2011). Tanpa adanya aspek ini, rasa kepemimpinan dan kerjasama akan melemah karena tidak ditekankan dalam pendidikan kepada warga negaranya. Akibatnya, negara menjadi riskan terhadap ancaman baik eksternal maupun internal.

Sistem pendidikan nasional harus dapat menumbuhkan rasa persatuan bangsa (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Dalam suatu negara, terdapat berbagai kelompok etnik, agama, dan bahasa. Rasa kebersamaan perlu ditumbuhkan dalam pendidikan agar dapat menjalin persatuan. Banyak negara merdeka dari penjajahan karena munculnya rasa persatuan di antara masyarakatnya. Knight (2004) mengingatkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan menjadi basis untuk mempersatukan berbagai kelompok dalam suatu negara.

Bahasa nasional merupakan hal penting dalam pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Terdapat berbagai bahasa di suatu negara. Tetapi, hanya ada satu bahasa yang menjadi bahasa resmi. Bahasa nasional dipergunakan sebagai pengantar di sekolah, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jauh Harman (2005) menyatakan bahwa semua warga negara harus dapat mengekspresikan kapasitasnya untuk pembangunan melalui bahasa nasional. Tanpa adanya suatu bahasa nasional, negara akan sulit untuk membangun rasa persatuan di antara warga negaranya.

Harman (2005) menyatakan bahwa filosofi politik yang mengontrol suatu negara dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dihindarkan. Dalam negara yang mengkampanyekan suatu demokrasi, sistem pendidikannya juga tidak akan terlepas dari isu tersebut. Sistem pembelajaran yang demokratis di sekolah-sekolah diwujudkan dalam rencana pengajarannya serta struktur organisasi. Dengan demikian, sistem politik akan mempengaruhi program pendidikan nasional suatu negara.

Dalam era globalisasi, sistem pendidikan suatu negara akan terkena pengaruh dari negara-negara lain (Cambridge dan Thompson, 2004). Dewasa ini, dunia telah disatukan melalui nilai-nilai universal dalam pendidikan. Apa yang terjadi di suatu negara, akan dapat merembet pula ke negara-negara yang lain. Melalui sistem komunikasi yang maju,

informasi-informasi dari berbagai sumber akan dengan mudah diakses. Hayden dan Thompson (1997) menambahkan bahwa negara yang maju akan berusaha membantu negara lain yang kurang, karena hal ini dapat berdampak pada mereka. Kerjasama antar negara banyak dilakukan dalam bidang pendidikan sehingga membentuk sistem pendidikan internasional yang didasarkan pada sistem pendidikan dari tiap-tiap negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey yang bersifat longitudinal. Data dikumpulkan selama ± 3 tahun, mulai tahun 2009 sampai 2011, yang diambil dari catatan tertulis selama berlangsungnya diskusi. Responden merupakan mahasiswa Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris Unsoed. Pada semester akhir, mahasiswa menulis skripsi sesuai dengan permintaan mereka. Mahasiswa bisa memilih melakukan penelitian yang terkait dengan bidang pengajaran.

Mahasiswa yang dipilih sebagai responden adalah mereka yang melakukan penelitian untuk skripsi mereka tentang sekolah berstandar internasional tingkat SMP di Purwokerto dengan bimbingan penulis. Rintisan Sekolah Standar Internasional dan Sekolah Berstandar Internasional di Indonesia sekarang sedang merebak keberadaannya. Kontroversi sekolah-sekolah tersebut dalam sistem pendidikan nasional telah menjadi perdebatan yang hangat. Beberapa pihak mengkritisi pendirian sekolah berstandar internasional tersebut, khususnya pada sekolah pemerintah yang membutuhkan *budget* cukup besar untuk proses pembelajarannya. Mereka mempertanyakan keefektifan sekolah-sekolah tersebut dalam pengembangan sistem pendidikan nasional Indonesia. Responden perlu mengetahui isu-isu sistem nasional pendidikan ini sebagai dasar dalam mereka melakukan penelitiannya.

Jumlah responden yang terlibat dalam survey ini meliputi 5 wanita dan 2 laki-laki. Adapun rinciannya adalah 2 mahasiswa dari angkatan 2009, 3 mahasiswa dari angkatan 2010 dan 2 mahasiswa dari angkatan 2011. Penelitian terkait dengan sistem pendidikan nasional sepanjang 2009 sampai dengan 2011 yang dilakukan di SMP Negeri 1 Purwokerto sebanyak 3 buah. Sementara itu, penelitian dengan tema sejenis yang dilakukan di SMP Negeri 2 Purwokerto sebanyak 4 buah.

Data yang terkumpul merupakan catatan ekstensif yang merupakan jawaban-jawaban responden tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Diskusi dilakukan dengan responden selama mereka menyusun skripsi. Dengan kata lain, proses pengambilan data tidak dilakukan secara intensif atau pada waktu tertentu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden terdiri dari pendapat mereka tentang kesadaran budaya, pentingnya pengembangan rasa cinta terhadap budaya sendiri, ekonomi, serta kesadaran untuk memiliki identitas nasional. Selain itu, responden mengungkapkan pandangan mereka terkait dengan bahasa resmi, sistem politik, karakter nasional, dan internasionalisasi sistem pendidikan nasional. Semua pendapat responden dicatat, kemudian diklasifikasikan agar dapat dibuat generalisasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Semua responden mengetahui bahwa suatu negara harus memiliki sistem pendidikan nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Ditambahkan oleh mereka, sistem pendidikan nasional dapat dipergunakan untuk kontrol terhadap implementasi di lapangan. Fatah, Hartati dan Mulyasari (2009) menekankan adanya kesempatan siswa untuk menyampaikan pemikirannya. Nampaknya, responden berpendapat bahwa kebebasan itu tidak seperti yang dilakukan di negara Barat. Siswa masih memerlukan arahan dari guru dalam mengungkapkan gagasannya.

Peran guru, sekolah, atau pemerintah dalam kontrol terhadap jalannya sistem pendidikan nasional mengimplikasikan apa yang terjadi dengan sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini tersirat dari apa yang disampaikan oleh semua responden tentang peran kontrol dari pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional. Temuan ini sesuai dengan Harman (2005) yang menyatakan bahwa filosofi politik negara akan mempengaruhi cara pandang bagaimana melaksanakan pendidikan nasional.

Meskipun demikian, hanya seorang responden dapat mengungkapkan sistem pendidikan nasional dengan budaya. Terdapat 2 responden yang menyatakan bahwa budaya dan pendidikan nasional tidak ada hubungannya. Mereka mengatakan bahwa pendidikan bersifat universal, sehingga tidak akan terpengaruh oleh budaya yang bersifat kontekstual.

Sistem pendidikan nasional tidak boleh memandang budaya sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan karena Indonesia memiliki bermacam-macam budaya sehingga tidak mungkin dijadikan satu kesatuan budaya. Pandangan responden tersebut bertolak belakang dengan Cambridge dan Thompson, (2004). Menurut para ahli tersebut, budaya yang bersifat universal terdiri dari bermacam budaya yang bisa disinergikan untuk memperkuat budaya yang beraneka ragam tersebut.

Terdapat 2 responden yang memandang budaya diperlukan dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk jati diri siswa. Menurut mereka, generasi muda lebih memilih budaya asing karena lebih menarik. Pemerintah harus menghentikan dan melarang masuknya nilai-nilai budaya asing tersebut yang akan merusak mental generasi muda. Pandangan ekstrem ini tidak sesuai dengan Keller (2011) yang mengatakan bahwa budaya yang rapuh dikarenakan oleh lemahnya pendidikan karakter bangsa serta kepemimpinan. Apabila faktor tersebut dimasukan dalam sistem pendidikan nasional, generasi muda tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh aspek budaya bangsa lain yang terkadang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan budaya lokal.

Dua responden mencermati budaya lokal sebagai aspek yang tidak sesuai dengan pandangan modern tentang sistem pendidikan. Mereka mencontohkan bagaimana budaya siswa yang harus patuh kepada guru, harus 'manut' dan tidak boleh membantah terhadap guru. Di mata mereka, ajaran-ajaran tersebut sudah tidak sesuai dengan pola pengajaran yang sekarang dipakai. Oleh karena itu, kedua responden sependapat bahwa budaya bisa merupakan ancaman bagi kelangsungan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendapat mereka berbeda dengan Ahmadi dan Amri (2010) yang melihat pendidikan harus memasukan aspek tersebut ke dalam sistem pendidikan nasional agar generasi muda nantinya bisa melestarikan budaya lokal.

Semua responden setuju terhadap pernyataan bahwa nilai-nilai universal muncul dalam setiap budaya di dunia. Nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional karena manusia pada umumnya akan melihatnya sebagai hal yang positif. Pandangan responden senada dengan apa yang disampaikan Cambridge dan Thompson (2004).

Rasa patriotisme dan kebangsaan siswa dapat ditingkatkan melalui sistem pendidikan nasional. Seluruh responden sepakat bahwa nilai-nilai itu penting. Oleh karena itu, aspek-aspek nasionalisme dan cinta tanah air harus terus dipupuk melalui sistem pendidikan nasional. Hayden dan Thompson (1997) menyarankan hal yang sama karena kecintaan terhadap tanah air akan menanamkan generasi muda untuk berjuang terhadap ancaman dari luar. Dengan demikian, aspek tersebut sangat penting dimasukkan pada sistem pendidikan nasional.

Terdapat 5 responden yang melihat keterkaitan antara aspek ekonomi dan sistem pendidikan nasional. Mereka berpendapat bahwa negara yang tingkat ekonominya tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah yang mempunyai dana cukup, dapat melengkapi sarana dan pra sarana yang dibutuhkan dalam pendidikan. Dengan demikian, warga negara akan dapat dijamin kebutuhan pendidikannya oleh pemerintah. Pandangan ini seirama dengan pendapat Fatah, Hartati dan Mulyasari (2009).

Tetapi, 2 responden memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa aspek ekonomi tidak perlu dimasukan dalam sistem pendidikan nasional. Saiah seorang responden mengatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak ada korelasinya dengan tingkat ekonominya. Banyak siswa dari kelas atas yang prestasi belajarnya tidak lancar. Implikasinya adalah fasilitas bukan merupakan faktor terpenting dalam sistem pendidikan nasional. Menurut mereka, ide dan pikiran lebih penting daripada kelengkapan fasilitas belajar-mengajar. Oleh karena itu, aspek ekonomi tidak perlu dipertimbangkan dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan menurut mereka, pendidikan yang bagus akan membuat tercapainya kemakmuran suatu negara. Pandangan mereka berkebalikan dengan pandangan Harman (2005) yang melihat aspek ekonomi mempengaruhi sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin kebebasan warga negara untuk berekspresi seperti yang disampaikan oleh Fatah, Hartati dan Mulyasari (2009). Semua responden setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya alasan yang diungkapkan berbeda-beda. Dua orang responden melihat tersebut harus dilihat dari tingkatan kelas siswa ketika belajar mengajar di kelas. Di Sekolah Dasar, siswa biasanya tidak tahu

untuk mengungkapkan pendapatnya. Biasanya mereka tergantung kepada guru atau senior mereka. Di level yang lebih tinggi, siswa sudah bisa berpendapat. Tapi, sebagian besar dari mereka enggan berbicara. Apalagi jika pendapatnya tidak sesuai dengan guru atau teman-temannya. Rasa sungkan untuk membuat konflik menjadi salah satu alasannya.

Terdapat 3 responden yang mengatakan bahwa dalam era modern, sudah sepantasnya siswa harus menyampaikan pandangannya, walaupun hal itu tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, guru harus mampu mendorong siswanya agar mau menyampaikan pendapatnya. Responden tersebut menyatakan bahwa rasa percaya diri siswa untuk berbicara di depan kelas masih kurang karena belum terbiasa.

Sebanyak 2 responden mengatakan bahwa aspek itu tidak sesuai dengan tradisi lokal. Guru adalah seorang yang pandai yang harus mengajarkan ilmunya kepada peserta didik. Mereka menganggap guru yang tidak bisa menjawab pertanyaan siswa dan tidak menguasai materi adalah guru yang bodoh. Oleh karena itu guru adalah pihak yang harus mengungkapkan pendapatnya kepada siswa dan siswa harus mematuhi apa yang disampaikan guru.

Sistem pendidikan nasional tidak menciptakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Semua responden setuju dengan pernyataan itu. Mereka mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Meskipun begitu, 4 responden mengatakan bahwa pada praktiknya, diskriminasi itu masih saja terjadi. Sistem pendidikan nasional Indonesia membuat kesenjangan antar sekolah untuk golongan kelas atas dan kelas bawah. Semua responden menyoroti Sekolah Berstandar Internasional dengan menerapkan sumbangan pendidikan yang lumayan tinggi. Oleh sebab itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa membayar sumbangan pendidikannya. Cambridge dan Thompson, (2004) mengingatkan bahwa munculnya perbedaan kelas sosial akan memperlemah pertahanan suatu bangsa.

Karakter nasional dalam sistem pendidikan nasional perlu diperhatikan. Semua responden setuju dengan pandangan ini. Hanya saja, 3 responden mempertanyakan karakter nasional yang mana dan seperti apa yang harus diadopsi pada sistem pendidikan nasional Indonesia. Mereka menyatakan karakteristik budaya Indonesia sangat beragam. Satu aspek pada suatu

budaya akan sesuai dengan budaya lainnya, tetapi juga sering kali tidak sesuai, bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, mereka berpikir perlu dirumuskan karakter nasional yang dimaksudkan. Sebenarnya Cambridge dan Thompson (2004) telah menyatakan adanya nilai-nilai universal yang tidak terpengaruh oleh budaya, tempat, dan konteks. Sudah barang tentu, karakter nasional dapat disarikan dari berbagai aspek yang universal di negara tersebut.

Semua responden sepakat bahwa sistem pendidikan nasional dapat menimbulkan persatuan bangsa. Terdapat 3 responden yang berpandangan bahwa persatuan bangsa perlu ditumbuhkan melalui sistem pendidikan nasional yang sama. Pendapat ini tentunya tidak sesuai dengan Cambridge dan Thompson (2004). Para ahli ini menyatakan bahwa sistem pendidikan harus bisa mendorong terhadap jalannya pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakatnya, bukan menciptakan pendidikan dengan satu standar.

Responden lain menganggap bahwa persatuan bangsa lebih mengarah kepada ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam. Rasa kebersamaan harus terus dipupuk agar mampu menjadi pondasi kokohnya suatu negara. Knight (2004) mendukung pendapat ini yang sesuai dengan persatuan bangsa dan cinta tanah air sebagai tameng untuk mengusir intrik-intrik baik dari dalam maupun luar.

Bahasa nasional dipandang sebagai sarana yang penting untuk sistem pendidikan nasional. Semua responden memiliki pemikiran yang sama terhadap pentingnya bahasa nasional. Bahasa nasional mempunyai peran krusial untuk komunikasi antar anggota yang memiliki bermacam bahasa. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali bahasa lokal. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus memasukan aspek bahasa nasional sebagai muatannya. Pandangan ini sesuai dengan Harman (2005) yang melihat pentingnya bahasa nasional dalam sistem pendidikan nasional.

Semua responden tidak sependapat dengan pernyataan keterkaitan antara politik dan pendidikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan pendapat Harman (2005) yang justru melihat adanya hubungan yang erat antar keduanya. Responden menganggap bahwa pendidikan di Indonesia jarang memasukkan ideologi-ideologi partai penguasa ke dalam sistem

pendidikan nasional. Mereka berpikir bahwa pendidikan di Indonesia bersifat bebas nilai dari filosofi politik partai yang berkuasa.

Sistem pendidikan diakui oleh semua responden akan terpengaruh oleh sistem pendidikan di negara-negara lain, terutama negara maju. Pendapat ini sesuai dengan Hayden dan Thompson (1997) yang melihat adanya keterkaitan antar satu negara dengan lainnya dalam bidang pendidikan. Semua responden menganggap bahwa dampak globalisasi dalam bidang pendidikan secara isi menguntungkan, tetapi secara moral bersifat negatif. Responden melihat bahwa dalam era globalisasi, materi peajaran yang disusun dalam sistem pendidikan nasional berusaha mencakup kemajuan teknologi di dunia. Di sisi lain, banyak siswa yang terpengaruh atau lebih memilih nilai-nilai asing daripada nilai budaya sendiri.

Penutup

Responden dalam penelitian ini cenderung menyetujui pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli. Hanya saja, terdapat faktor yang sama sekali bertolak belakang dengan pandangan para ahli yaitu politik dan pendidikan nasional. Nampaknya, responden mengamatnya dari konteks yang mereka lihat di masyarakat di Indonesia. Meskipun begitu, responden pada dasarnya telah memahami konsep yang sama tentang sistem pendidikan nasional.

Melihat hasil yang diperoleh, sistem pendidikan nasional perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum agar arah dari pendidikan nasional menjadi jelas. Selama ini memang masyarakat banyak yang pasif terhadap sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya kesenjangan informasi ini dapat menghambat lancarnya implementasi pendidikan nasional. Jika masyarakat telah paham, jalannya pendidikan nasional dapat dengan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, target pencapaian pendidikan nasional bisa mencapai sasaran dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, I dan Sofan A. 2010. *Strategi Pembelajaran SBI dan Nasional*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Cambridge, J. dan Thompson, J. 2004. Internationalism and Globalization as contexts for International Education. *Compare*, 34 (2), hal : 161-175.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Panduan Penyelenggaraan Rintisan SD Bertaraf Internasional*. Jakarta : Direktorat Pembinaan TK dan SD.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional,
- Fatah, N.; Tatat H. dan Effy M. 2009. Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional. *Educationist*, III (19), hal : 19-31.
- Harman, G. 2005. Internationalization of Australian Higher Education: A Critical Review of Literature and Research. Dalam P. Ninnes dan M. Hellesten (Editor). *Internationalizing Higher Education: Critical Exploration of Pedagogy and Policy*. Hong Kong : Comparative Education Research Centre.
- Hayden, M.C. dan Thompson, J.J. 1997. Students Perspective on International Education: A European Dimension. *Oxford Review of Education*, 23 (4), hal : 459-478.
- Keller, D. 2011. *Toward a System of Evaluation A School International Education Program*. Blikent : Blikent Laboratory and International School.
- Knight, J. 2004. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. *Journal of Studies in International Education*, Vol. 8.

Kustalasari, A. 2009. *The International Standard School Project in Indonesia: A Policy Document Analysis*. Ohio : The Ohio State University.